

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Pembangunan merupakan sebuah aspek perbuah sosial yang di rencanakan melalui aspek program pembangunan pedesaan yang dimana untuk memperbaiki kehidupan masyarakat baik dalam segi perekonomian Desa ataupun hal yang lainnya. Maka di dalam program perencanaan pembangunan infrastuktur, masyarakat Desa tersebut dapat menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan dasar yang mereka butuhkan seperti, kebutuhan dari segi sosial ataupun kebutuhan dalam segi ekonomi.

Upaya dalam perencanaan pembangunan infrastruktur ini diberikan tempat sentral kepada pembangunan di pedesaan. Karena setiap program pembangunan Nasional, pembangunan Desa ini merupakan salah satu aspek integral dari pembangunan Nasional dalam artian sebuah langkah yang strategis, karena kita tahu bahwasanya Desa itu merupakan sebuah basis di dalam bangsa negara kita yang diukur melalui pembangunan Nasional itu sendiri.

Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang dimana memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD,2014:6).

Maka atas dasar di buatnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa ini menghasilkan perubahan yang memang signifikan, antara desa dengan pemerintah yang membuat relasi baik dari mulai aspek pembangunan, perencanaan, serta kewenangan. Karena Pemerintah Desa telah diberi sebuah wewenang dan juga amanat untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan desa tersebut. Sehingga pembangunan desa ini merupakan sebuah aspek terpenting di dalam pembangunan negara kita, karena mayoritas penduduk Indonesia ini pada dasarnya kebanyakan dari masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pedesaan.

Maka dalam kebijakan dari pemerintah untuk segi pembangunan daerah itu sendiri dimana untuk membuat sebuah pemerataan dalam pertumbuhan ekonomi, serta independensi sosial dan ekonomi melalui pemanfaatan potensi yang ada di daerah, dikelola secara maksimal dan mendorong upaya untuk meminimalisir ketergantungan pada sumber daya tak terbarukan yang berpihak pada warga negara yang berkualitas, progress, serta mandiri dalam keanekaragaman masyarakat tersebut. Adapaun langkah untuk mengembangkan masyarakat yang mandiri dan berkualitas itu adalah dimana masyarakat mengembangkan potensi yang dimilikinya dalam sumber daya sehingga nantinya meningkatkan upaya taraf hidup masyarakat yang sejahtera dan merata.

Kemudian dalam UU RI Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bab X Pasal 258 mengenai Pembangunan Daerah menyatakan bahwa daerah senantiasa melakukan pembangunan agar nantinya bisa terus meningkatkan kesenjangan pendapatan di masyarakat, kesempatan untuk bekerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik serta daya saing di setiap daerah.

Dalam pelaksanaan program pembangunan di setiap daerah tersebut maka program yang akan di laksanakan itu salah satunya adalah program infrastuktur. Program infrastuktur ini berarti adalah program segala sesuatu aspek penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses baik di dalam usaha pembangunan. Pembangunan infrastuktur ini merupakan suatu rangkaian pertumbuhan serta perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun aspek prasarana atau dengan terlaksananya mekanisme pembangunan.

Program pembangunan infrastuktur desa memiliki sebuah otoritas dalam merencanakan, merumuskan serta melaksanakan kebijakan tata olah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan serta saran dan masukan aspirasi masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan budaya masyarakat desa tersebut. kemudian dalam pedoman pembangunan Desa bab I ketentuan umum pasal 1 Ayat 2 yaitu kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di dalam bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul serta adat istiadat desa (Permendagri, 2014:114).

Di dalam pembangunan desa agar senantiasa meningkatkan kesenjangan masyarakat adalah melalui pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dalam infrastuktur ini meliputi beberapa aspek kegiatan seperti pekerjaan kontruksi untuk pembangunan atau meningkatkan dalam infrastuktur, pengelolaan infrastuktur atau pemeliharaan infrastuktur supaya ada kemanfaatan infrastuktur. Kita bisa lihat di Desa Karangpakuan merupakan desa yang masih berkembang dimana letak desa ini

berada di wilayah kabupaten Sumedang tepatnya provinsi Jawa Barat, sebagian masyarakat di desa Karangpakuan ini bekerja sebagai petani, peternak, ada juga nelayan karena melihat desa Karangpakuan berada dekat dengan bendungan Jatigede. Berdasarkan rancangan kerja yang berada di pemerintah desa karangpakuan ini memiliki 5 aspek bidang dalam program pembangunan yaitu :

1. Penyelenggaraan pemerintah
2. Infrastruktur Pembangunan.
3. Pembinaan Masyarakat.
4. Pemberdayaan Masyarakat.
5. Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa.

(Dokumentasi, Pemdes Desa Karangpakuan Tahun 2020).

Kita bisa melihat bahwa pembangunan yang telah di canangkan oleh pemerintah Desa Karangpakuan tersebut, melihat beberapa dari aspek di atas mempunyai presentase yang tinggi itu berada di aspek program infrastuktur pembangunan. Maka hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berada di desa Karangpakuan ini sangat penting bagi keberlangsungan kesejahteraan masyarakat. Dalam sebuah perencanaan desa tersebut maka suatu kegiatan dilakukan untuk waktu mendatang diawali dengan tahapan proses dan kegiatan penyusunan program. Pembangunan infrastruktur ini sangat penting untuk melahirkan masyarakat yang semakin maju di Desa Karangpakuan, dimana semakin berkembang infrastruktur desa maka akan semakin sejahtera masyarakatnya dalam mencapai pembangunan di daerah ini.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang bab 1 pasal 1 ayat 16 Tahun 2018 Tentang ketentuan umum bahwa pembangunan pedesaan

merupakan cara untuk meningkatkan kualitas hidup yang paling berguna dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pedesaan. Semua program yang ada di Desa Karangpakuan terealisasi dengan cukup baik, namun masih ada program yang belum terealisasi, diantaranya :

**Tabel 1.1**

**Program pembangunan infrastruktur Desa Karangpakuan Tahun 2020**

No	Program infrastuktur pembangunan	Keterangan	
		Teralisasi	Belum Terealisasi
1	Perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin (Rutilahu)	✓	
2	Pemeliharaan selokan di lingkungan tiap RT	✓	
3	Rehabilitas Mesjid dan Mushola se-Desa Karangpakuan	✓	
4	Pembangunan Gapura di Desa Karangpakuan	✓	
5	Insentif Guru Ngaji	✓	
6	Rehabilitas drainase jalan cinawing-pakualam blok rw 2		✓
7	Pembangunan TPT dusun Legok		✓
8	Pembangunan gang lingkungan rw 4		✓

9	Pembangunan daerah irigasi lebak euneung		✓
10	Jembatan Jalan poros cinawing-cikawung		✓
11	Pengaspalan jalan Prabu Lembu Agung		✓

(Arsip Perencanaan Desa Karangpakuan RPJMD dan RKPDES Tahun 2020)

Table di atas maka kita bisa melihat, bahwa desa ini mempunyai beberapa program yang memang baik untuk menunjang di dalam hal segi infrastruktur. Program yang ada di desa tersebut merupakan langkah strategis yang baik di dalam perencanaan yang nantinya dapat di realisasikan dengan baik bagi masyarakat agar senantiasa bisa lebih merasakan kebermanfaatan infrastruktur pembangunan tersebut.

Salah satu program yang sudah berjalan dengan baik ini adalah Rehabilitas Mesjid dan Mushola se-Desa Karangpakuan menggunakan anggaran APBDES sebanyak 19 unit dengan total anggaran Rp. 400.000.000 agar terwujudnya suasana ibadah yang nyaman, lalu ada bantuan perbaikan rumah sehat fakir miskin sebanyak 20 unit untuk masyarakat yang tidak mampu dengan menggunakan anggaran APBDES senilai Rp.240.000.000 agar terciptanya rumah yang layak huni, lalu ada bantuan insentif guru ngaji per 3 bulan sekali dibayarkan sebanyak 27 orang dengan menggunakan anggaran APBDES total anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp.16.200.000

Tetapi, pada kenyataanya kita bisa melihat bahwasanya di desa Karangpakuan tersebut masih terdapat beberapa permasalahan atau kendala yang belum bisa terealisasikan di dalam program-program yang ada pada tabel

tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa program pembangunan infrastruktur Desa Karangpakuan tersebut masih belum sepenuhnya efektif dan juga produktif. Maka ini merupakan sebuah permasalahan utama di pemerintahan Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

Hasil wawancara saya dengan aparat pemerintah Desa Karangpakuan yaitu bersama sekretaris desa, jadi penyebab dari belum tercapainya program dari pembangunan infrastruktur ini adalah dimana sebagian masalah itu terletak pada permasalahan keuangan atau dana. Oleh karena itu, di dalam sebuah pelaksanaannya infrastruktur pembangunan ini harus senantiasa bisa meminimalisir keuangan yang ada karena dana tersebut sangat lama kunjung turun dari agenda yang sudah di tentukan. Maka sangat jelas dengan ini akan menjadi dampak begitu besar terhadap target pencapaian pembanguna infrastruktur tersebut.

Program pembangunan infrastruktur ini di dalam pelaksanaannya perlu dilakukan sebuah pemantauan dan juga evaluasi untuk bisa melihat kinerja sebuah objek keberhasilan atau pencapaian di dalam program pembangunan infrastruktur tersebut. Dengan menggunakan sistem evaluasi, dapat menambah informasi yang relevan tidak hanya pada gambaran umum, tetapi juga pada proses implementasi program, termasuk hasil, manfaat, dan dampak atau faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kapasitas yang ada di infrastruktur, program pembangunan untuk mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta peningkatan kualitas akses pelayanan publik.

Evaluasi ini erat kaitannya dengan program pembangunan infrastruktur desa, karena terdapat kumpulan program kegiatan dimana pemerintah desa

dapat melihat hasil dari program pembangunan infrastruktur tersebut, yang benar-benar dilaksanakan sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan latar belakang yang di teliti tersebut, maka dengan ini peneliti sangat tertarik dengan mengadakan penelitian yang di tuangkan dalam proposal yang berjudul **“Evaluasi Program Pembangunan Infrastuktur Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2020”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Terdapat program pembangunan infrastruktur yang direncanakan tetapi belum terlaksana.
2. Minimnya anggaran dana yang tersedia untuk pembangunan infrastuktur yang sudah direncanakan.
3. Masih kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program pembangunan infrastuktur.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Evaluasi program pembangunan infrastuktur Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Evaluasi program pembangunan infrastuktur Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi pedoman bagi berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, disini peneliti mengklasifikasikan manfaat dan kegunaan penelitian ini menjadi dua bagian, yaitu teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kajian keilmuan serta dapat memperkaya sebuah pengetahuan di dalam Ilmu Administrasi, untuk program pembangunan infrastuktur Desa yang di peroleh peneliti selama kuliah tersebut.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian ilmiah dan pengalaman untuk penelitian selanjutnya

- b. Bagi Pemerintahan Desa Kangpakuan

Kajian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi agar pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Karangpakuan dapat dilaksanakan dengan baik dan optimal.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian keilmuan serta referensi maupun rujukan bagi masyarakat.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Maka dari itu untuk aspek sebuah kebijakan pemerintah dalam pembangaunan di daerah tersebut harus mengarah kepada kebijakan yang bersifat rata serta pertumbuhan ekonomi mandiri dengan senantiasa memanfaatkan potensi lokal yang jauh lebih optimal menuju masyarakat yang maju, dan mandiri yang nantinya bisa mendorong kekuatan usaha yang tidak hanya terus terusan ketergantungan terhadap sumber daya .

Program pembangunan infrastuktur Desa Karangpakuan itu sangatlah penting dalam mewujudkan kemajuan desa dan masyarakat juga, dimana ketika pembangunan itu memadai maka akan menjadikan desa tersebut menjadi jauh lebih sejahtera. Dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Karang Pakuan sebenarnya semuanya berjalan belum optimal, karena ada beberapa program yang tidak terlaksana, yang disebabkan oleh kurangnya dana serta lambatnya turun dana dari pemerintah pusat lalu peran dari masyarakat dari mulai kesadaran untuk menjaga infrastuktur juga masih minim.

Dengan adanya sebuah evaluasi tersebut akan menambah sebuah informasi yang tidak hanya meliputi tentang perkembangan proses program tersebut, melainkan akan mendapatkan hasil yang bermanfaat dan juga bisa melihat faktor-faktor yang menghambat berkembangnya infrastruktur yang potensial bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan publik itu sendiri.

Evaluasi program ini sangat berkaitan langsung dengan program pembangunan infrastuktur desa Karangpakuan, karena di dalam program tersebut merupakan sebuah rangkaian agar terciptanya rangkaian dalam kegiatan pemerintah desa serta yang nantinya melihat program dari hasil pembangunan infrastuktur tersebut bisa di buat dan terealisasikan sesuai dengan program yang sudah di tetapkan tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan Teori Dunn, dimana Dunn (2000:608) mengemukakan bahwa teori Evaluasi yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsifitas, dan juga ketepatan untuk dapat meneliti Evaluasi Program Pembangunan Infrastuktur Desa Karangpakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang Tahun 2020. Langkah yang di kemukakan teori Wiliam N.Dunn ini merupakan sebuah langkah yang sudah seusai untuk peneliti.

**Gambar 1.1**

Kerangka Pemikiran

